

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penghitungan Indeks Williamson

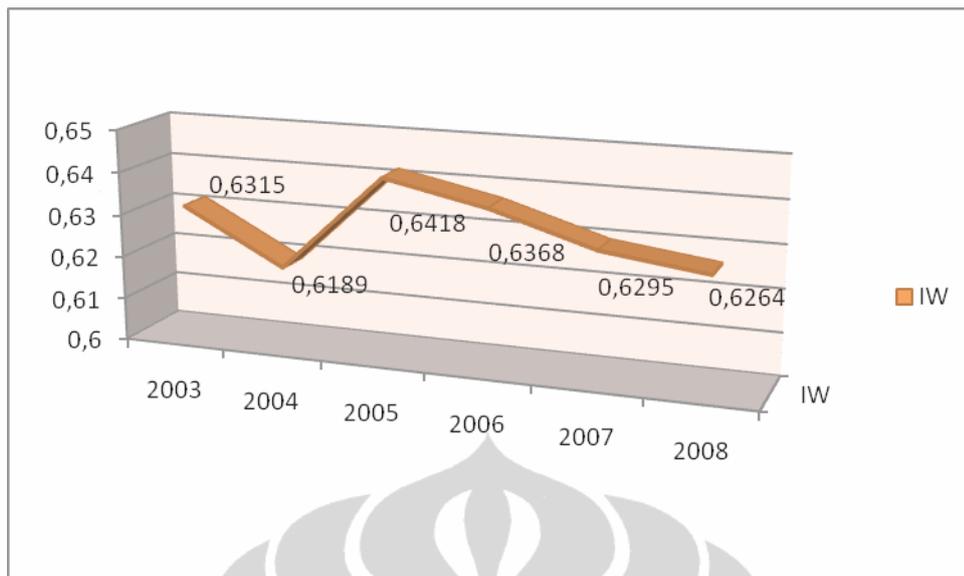
Untuk melihat ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat digunakan alat analisis Indeks Williamson. Hasil analisis tersebut menunjukkan ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 sangat tinggi dan berfluktuatif. pada tahun 2003 Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat sebesar 0,6315 dan turun menjadi 0,6189 pada tahun 2004. Namun pada tahun berikutnya Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat meningkat lagi menjadi 0,6418 dan menurun pada tahun-tahun berikutnya sampai pada tahun 2008 Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat menjadi 0,6264. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1. (penghitungan Indeks Williamson dapat dilihat pada lampiran 2.)

Tabel 4.1.
Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003 - 2008

Tahun	Indeks Williamson (%)
2003	0,6315
2004	0,6189
2005	0,6418
2006	0,6368
2007	0,6295
2008	0,6264

Sumber: : Data diolah

Sementara trend perkembangan disparitas/ketimpangan pendapatan yang dicerminkan dalam Indeks Williamson di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada grafik 4.1



Sumber: : Data diolah

Grafik 4.1. Trend Kenaikan Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 - 2008

Pada awal-awal penerapan desentralisasi di Provinsi Jawa Barat, sekitar tahun 2001 sampai tahun 2003 dimana pada masa itu terdapat tiga kota yang baru berdiri yaitu Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kota Banjar, tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota memiliki tingkat kesenjangan yang cukup tinggi yaitu 0,6315. Hal ini diduga karena penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Barat, tingkat kesiapan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan peraturan perundang-undangan berbeda-beda apalagi pada pemerintahan yang baru saja terbentuk yang masih menata pemerintahannya berbeda dengan kabupaten/kota yang sudah cukup mapan sebelumnya sehingga tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota cukup tinggi.

Pada tahun 2004, tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana Indeks Williamson pada tahun itu sebesar 0,6189. Hal ini dimungkinkan adanya pengaruh kenaikan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Jawa Barat sebesar 0,10 point dari tahun sebelumnya. Tahun 2003 LPE Provinsi Jawa Barat sebesar 4,67% sedangkan pada tahun 2004 meningkat menjadi 4,77%.

Pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak dua kali dalam

setahun. Hal ini diduga memacu kenaikan tingkat kesenjangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat karena efek dari naiknya harga BBM tersebut menyebabkan jumlah penduduk yang miskin semakin bertambah (tahun 2004 persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat sebesar 12,10% meningkat menjadi 12,86% pada tahun 2005; BPS) sehingga jurang pemisah antara si miskin dan si kaya semakin melebar.

Untuk tahun-tahun selanjutnya Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat menurun sampai pada indeks 0,6264 pada tahun 2008. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat cenderung bertumbuh positif, kecuali pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan yang disebabkan kondisi ekonomi global yang mengalami guncangan.

Dari grafik 4.1 terlihat secara umum Indeks Williamson di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan dipengaruhi oleh penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Barat, dimana salah satu komponen desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk pemeratakan pembangunan adalah dana perimbangan yang diberikan kepada daerah. Dana perimbangan untuk Provinsi Jawa Barat setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti sehingga menurunkan tingkat disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Perkembangan dana perimbangan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.
Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003 - 2008

Tahun	Dana Perimbangan
2003	10.337.769.275,94
2004	11.048.236.713,20
2005	11.750.555.896,50
2006	17.564.971.992,11
2007	18.263.675.918,14
2008	19.948.834.395,44

Sumber: : Jawa Barat dalam Angka, diolah

Apabila dikaitkan dengan Tipologi Klaasen yang telah diuraikan dalam Bab 2 maka dapat dijelaskan bahwa ternyata tingkat disparitas pendapatan antar 4 kuadran tersebut termasuk disparitas yang rendah, ini

dapat terlihat dari rata-rata Indeks Williamson masing-masing kuadran yang berkisar antara 0,025 sampai 0,27.

Tabel 4.3.
Indeks Williamson Berdasarkan Kuadran pada Tipologi Klaesen
Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 – 2008

Tahun	IW			
	Kuadran 1	Kuadran 2	Kuadran 3	Kuadran 4
2003	0,1968	0,0683	0,2477	0,0438
2004	0,1817	0,0702	0,2479	0,0427
2005	0,1725	0,0912	0,3056	0,0420
2006	0,1709	0,0927	0,2871	0,0422
2007	0,1639	0,0962	0,2816	0,0426
2008	0,1549	0,0991	0,2752	0,0430
Rata-rata	0,1734	0,0863	0,2742	0,0427

Sumber: : Data diolah

Indeks Williamson yang tertinggi terdapat pada kuadran 3 dimana kuadran ini meliputi kabupaten/kota yang tingkat kemakmuran dan kinerja ekonominya relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota pada umumnya dengan rata-rata Indeks Williamson sebesar 0,2742 namun masih termasuk disparitas rendah. Sedangkan Indeks Williamson terendah terdapat pada kelompok kabupaten/kota yang kinerja perekonomiannya cukup pesat namun nilai PDRB per kapitanya masih dibawah PDRB per kapita provinsi yaitu kuadran 4 dimana rata-rata Indeks Williamson untuk kuadran ini adalah 0,0427 atau sudah cukup merata. Hal ini dimungkinkan karena tipe kabupaten/kota dalam kuadran ini cukup seragam yaitu daerah penyangga ibu kota seperti Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Sukabumi. Begitu juga dengan kuadran 2 rata-rata Indeks Williamson termasuk disparitas yang cukup merata yaitu sebesar 0,0863. Sedangkan kelompok yang termasuk dalam kuadran 1 tingkat disparitas pendapatannya lebih tinggi dari kuadran 4 dan kuadran 2 karena selisih antara PDRB per kapita Kabupaten Bekasi dengan kab/kota lainnya dalam satu kelompok cukup jauh dimana PDRB per kapita Kabupaten Bekasi mencapai angka 18 jutaan, sedangkan Kabupaten Karawang dan Kota Bandung rata-rata mencapai angka 6 sampai 8 jutaan.

Analisis disparitas pendapatan yang menggunakan Indeks Williamson mempunyai sedikit batasan yaitu tidak dapat mengenali lebih jauh kesenjangan antar kabupaten/kota dan tidak dapat menelusuri faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesenjangan pendapatan tersebut, untuk itu dalam penelitian ini digunakan alat analisis lain yaitu analisis regresi data panel yang akan diuraikan dalam sub bab selanjutnya.

4.2. Hasil Analisis Regresi

4.2.1 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Setelah melakukan *running* pada software Eviews dengan metode *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* maka selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi untuk memilih metode mana yang lebih cocok untuk model penelitian ini. Pengujian signifikansi ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Uji Chow

Uji Chow ini dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model dengan asumsi bahwa slope dan intersep sama (*common effect*) dan model dengan asumsi bahwa slope sama tetapi berbeda intersep (*fixed effect*). Hipotesis nol dari uji ini adalah model *common effect* sedangkan hipotesis alternatifnya adalah model *fixed effect* atau *random effect*. Ringkasan hasil Uji Chow ini dapat dilihat pada tabel 4.4. (uji chow secara keseluruhan dapat dilihat dalam lampiran 9.)

Tabel 4.4.
Hasil Uji Chow

Model	RSS ₁	RSS ₂	F _{stat}	F _{tabel}	Keputusan
disparitas	1,62 x 10 ¹⁵	2,64 x 10 ¹³	1079,03	2,02	H ₀ ditolak

Kesimpulan: H₀ ditolak dengan demikian model *fixed effect/random effect* lebih baik dibandingkan dengan model *common effect* atau terdapat terdapat efek individual dalam model yang dibuat.

Keterangan: RSS₁ = residual sum of squares model common effect

RSS₂ = residual sum of squares model fixed effect

Sumber : data diolah

Dari hasil uji chow diperoleh kesimpulan bahwa model *fixed effect/random effect* lebih baik dibandingkan model *common effect* sehingga asumsi bahwa koefisien intersep dan slope adalah sama tidak berlaku atau dengan kata lain model panel data yang tepat untuk menganalisis perilaku kedelapan kecamatan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect* dengan teknik *least square dummy variable (LSDV)* daripada model *common effect*.

2. Uji Hausman

Langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk memilih apakah model *fixed effect* atau model *random effect* yang cocok untuk mengestimasi model disparitas. Hipotesis nol dari uji ini adalah model *random effect* sedangkan hipotesis alternatifnya adalah model *fixed effect*. Ringkasan hasil Uji Hausman ini dapat dilihat pada tabel 4.5. (uji hausman secara keseluruhan dapat dilihat dalam lampiran 10.)

Tabel 4.5.
Hasil Uji Hausman

Model	b_fixed	b_gls	χ^2_{stat}	χ^2_{tabel}	Keputusan
disparitas	R ₁ = -327,9911	R ₁ = -5795,377	21,0379	14,0671	H ₀ ditolak
	R ₂ = 21062925	R ₂ = -1,6 x 10 ⁸			
	R ₃ = -348,7350	R ₃ = -1969,691			
	R ₄ = -13454,66	R ₄ = 12698,96			
	R ₅ = 2754,603	R ₅ = 5561,972			
	R ₆ = 199984,2	R ₆ = 248557,3			
	R ₇ = 0,172387	R ₇ = 2,086733			

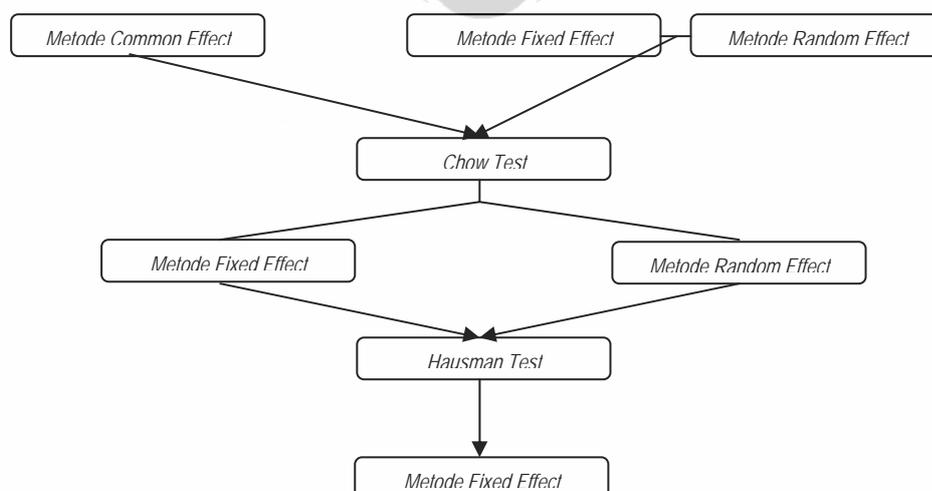
Kesimpulan: H₀ ditolak dengan demikian model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *random effect*.

Keterangan: *b_fixed* = koefisien model *fixed effect*

b_gls = koefisien model *random effect*

Sumber : data diolah

Dari hasil pengujian signifikansi model yang digunakan diperoleh model *fixed effect* yang cocok untuk penelitian ini. Selain menggunakan kedua uji signifikansi tersebut, hal ini juga didasarkan pada hasil penelitian Puspita (2005) yang menyatakan bahwa pemilihan model *fixed effect* dapat dilakukan apabila data yang digunakan meliputi seluruh individu dalam populasi atau hanya meliputi seluruh individu tetapi tidak diambil secara acak. Diagram alur pengujian signifikansi model diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 4.2 Diagram Alur Pengujian Signifikansi Model

Setelah melewati 2 (dua) tahap pengujian signifikansi model maka dilakukan uji hipotesa dan signifikansi untuk model yang terpilih. Dalam penelitian ini dipilih model *fixed effect* dengan persamaan sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = 10056347 RASIOGURSD_{it} + 107,6548 JALAN_{it} - 2613,171 SAPKES_{it} + 1571,677 DOKTER_{it} + 157986,6 TPAK_{it} + 0,281614 INVESTASI_{it}$$

dimana hasil estimasi model melalui pengolahan data dengan software *Eviews* ditampilkan dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Hasil Estimasi Model Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003 - 2008

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Prob
RASIOGURSD	10056347	1980164	5,078542	0,0000
JALAN	107,6548	74,00886	1,454620	0,1484
SAPKES	-2613,171	1657,767	-1,57631	0,1176
DOKTER	1571,677	311,8427	5,039968	0,0000
TPAK	157986,6	10283,04	15,36380	0,0000
INVESTASI	0,281614	0,087435	3,220859	0,0016
$R^2 = 0,998382$				

4.2.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji Hipotesis :

- ✓ $H_0 : \beta_n = 0; n = 1, 2, \dots, 6$ (tidak ada hubungan linier)
- ✓ $H_1 : \text{Lainnya}$ (ada hubungan linier)
- ✓ $\alpha = 0,05$
- ✓ Signifikan uji

Hasil signifikan uji koefisien regresi secara parsial dirangkum dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7.
Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Variabel	Deskripsi Variabel	Prob	Signifikansi
RASIOGURSD	Rasio guru thdp murid SD	0,0000	Signifikan
JALAN	Panjang jalan dalam kondisi baik	0,1484	Tidak signifikan
SAPKES	Sarana kesehatan (puskesmas)	0,1176	Tidak signifikan
DOKTER	Jumlah dokter/paramedis	0,0000	Signifikan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0,0000	Signifikan
INVESTASI	Jumlah investasi	0,0016	Signifikan

✓ Daerah kritis : H_0 ditolak jika signifikan uji $< \alpha$

✓ Kesimpulan:

Karena nilai signifikan uji ($\beta_1, \beta_4, \beta_5$, dan β_6) $< \alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak sehingga rasio guru terhadap murid SD (variabel RASIOGURSD), jumlah dokter/paramedis (variabel DOKTER), tingkat partisipasi angkatan kerja (variabel TPAK), dan jumlah investasi (variabel INVESTASI) signifikan masuk ke dalam persamaan regresi atau dengan kata lain empat variabel tersebut secara individu berpengaruh terhadap variabel PDRB per kapita.

Adapun panjang jalan dalam kondisi baik (variabel JALAN), dan sarana kesehatan (variabel SAPKES) tidak masuk ke dalam persamaan karena nilai probabilitasnya $> \alpha = 5\%$ yang berarti H_0 diterima. Dengan kata lain secara individu kedua variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel PDRB per kapita.

Kedua variabel tersebut di atas (panjang jalan dalam kondisi baik dan sarana kesehatan) tidak berpengaruh terhadap variabel PDRB per kapita dimungkinkan karena penambahan unit tiap tahun dari kedua variabel tersebut tidak cukup besar selain itu bisa jadi sarana kesehatan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal, atau sarana kesehatan banyak tetapi kurang berkualitas sehingga bukan faktor yang mendorong peningkatan PDRB per kapita.

4.2.3 Pengujian Model Secara Keseluruhan (uji F)

Uji Hipotesis :

✓ $H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_n ; n = 1, 2, \dots, 6$ (model tidak signifikan menjelaskan variabel dependen)

H_1 : minimal ada satu $\beta_i \neq 0$ (model signifikan menjelaskan variabel dependen)

✓ $\alpha = 0,05$

✓ Signifikan uji = 0,0000 atau $F_{hitung} = 2447,365$

✓ Daerah kritis : H_0 ditolak jika signifikan uji $< \alpha$

✓ Kesimpulan:

Karena signifikan uji (0,0000) $< \alpha$ atau $F_{hitung} = 1026,560 >$

$F_{tabel} = F_{(0,05;6;150)} = 2,02$, maka H_0 ditolak sehingga minimal ada satu

$\beta_i \neq 0$ atau dengan kata lain secara bersama-sama rasio guru terhadap murid SD (variabel RASIOGURSD), panjang jalan dalam kondisi baik (variabel JALAN), sarana kesehatan (variabel SAPKES), jumlah dokter/paramedis (variabel DOKTER), tingkat partisipasi angkatan kerja (variabel TPAK), dan jumlah investasi (variabel INVESTASI) berpengaruh terhadap variabel PDRB per kapita.

4.2.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil estimasi model *fixed effect* diperoleh nilai R^2 sebesar 0,998382 Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel-variabel bebas rasio guru terhadap murid SD (variabel RASIOGURSD), panjang jalan dalam kondisi baik (variabel JALAN), sarana kesehatan (variabel SAPKES), jumlah dokter/paramedis (variabel DOKTER), tingkat partisipasi angkatan kerja (variabel TPAK), dan jumlah investasi (variabel INVESTASI) yang ada dalam model tersebut dapat menjelaskan sebanyak 99,83 persen terhadap variasi variabel PDRB per kapita. Sebanyak 0,17 persen variasi dalam variabel dependent dijelaskan oleh variasi variabel lainnya yang tidak dijelaskan di dalam model.

4.2.5 Uji Multikolienaritas

Multikolienaritas adalah adanya hubungan antara variabel independen dalam satu regresi. Apabila terdapat masalah tersebut maka akan melanggar salah satu asumsi dalam metode OLS yaitu tidak ada hubungan linier antara variabel independen. Salah satu *rule of thumb* tentang gejala multikolienaritas adalah model mempunyai koefisien determinasi yang tinggi (R^2) katakanlah diatas 0,8 tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji t. Namun berdasarkan uji F secara statistik signifikan yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini terjadi suatu kontradiktif dimana berdasarkan uji t secara individual variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, namun secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Dari hasil regresi terdapat empat variabel independen yang signifikan (RASIOGURSD, DOKTER, TPAK, dan INVESTASI) dan tiga variabel independen yang tidak signifikan (SAPDIKSD, JALAN, dan SAPKES) sedangkan nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,998382 sesuai dengan *rule of thumb* dapat disimpulkan model regresi tidak mempunyai masalah multikolienaritas. Namun untuk membuktikan secara statistik maka digunakan matriks korelasi antar variabel independen untuk melihat apakah ada hubungan linier antara variabel independen atau gejala multikolienaritas. Dari hasil matriks korelasi antar variabel dalam lampiran 10. terdapat nilai korelasi yang lebih dari 0,8 yaitu antara variabel SAPDIKSD dan SAPKES sebesar 0,907254. salah satu penyembuhan gejala multikolienaritas adalah dengan cara menghilangkan variabel yang mempunyai korelasi yang paling besar, maka variabel SAPDIKSD dikeluarkan dari model awal.

4.2.6 Uji Autokorelasi

Secara harfiah, autokorelasi adalah adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Sedangkan salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan yang satu dengan variabel gangguan yang lain.

Autokorelasi pada umumnya terjadi pada data runtut waktu (*time series*) sedangkan data *cross section* diduga jarang ditemui adanya unsur autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat digunakan Metode Durbin-Watson (DW). Sebagai aturan kasar (*rule of thumb*) dari metode ini adalah jika nilai d adalah 2 (dua), maka kita bisa mengatakan bahwa tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

Namun dalam penelitian ini digunakan model *fixed effect* yang tidak perlu mengasumsikan bahwa komponen gangguan tidak berkorelasi dengan variabel independen yang mungkin sulit dipenuhi atau dengan kata lain model ini tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial korelasi, sehingga uji tentang autokorelasi dapat diabaikan. (Nachrowi, 2006)

4.2.7 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul jika variabel gangguan mempunyai varian yang tidak konstan. Heteroskedastisitas akan sering ditemui dalam data *cross section*, sementara data *time series* jarang mengandung unsur heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini masih menghasilkan estimator yang linier dan tidak bias namun tidak lagi efisien karena tidak mempunyai varian yang minimum.

Dalam penelitian ini model *fixed effect* digunakan untuk mengestimasi parameter regresi. Dari model *fixed effect* awal kemudian diuji dengan *White Heteroscedasticity Consistence Variance* pada Eviews 4.0 dan didapatkan output seperti pada lampiran 5. Dari output tersebut terlihat adanya perubahan di mana beberapa variabel independent sekarang telah signifikan secara statistik. Perubahan yang terjadi akibat

dikonsistensikannya *varian error* menunjukkan bahwa pada model awal memang terdapat heteroskedastisitas.

4.3. Pembahasan

4.3.1 Interpretasi Model

Untuk interpretasi model yang didapat maka model pertama dilakukan *running* ulang dengan menghilangkan variabel-variabel yang tidak signifikan dari model sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = 12779964 RASIOGURSD_{it} + 1520,432 DOKTER_{it} + 150959 TPAK_{it} + 0,275108 INVESTASI_{it}$$

Dari model diatas dapat diinterpretasikan variabel-variabel yang signifikan sebagai berikut:

a. Rasio guru terhadap murid tingkat sekolah dasar

Dari model diperoleh koefisien RASIOGURSD sebesar 12,78 juta dengan probabilitas 0,0000 yang dibawah $\alpha=5\%$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 orang guru per 1000 murid tingkat sekolah dasar maka akan meningkatkan PDRB per kapita sebesar 12,78 ribu rupiah.

b. Jumlah dokter/paramedis yang bekerja di puskesmas

Dari model diperoleh koefisien DOKTER sebesar 1.520,43 dengan probabilitas 0,0000 yang dibawah $\alpha=5\%$ menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 orang dokter/paramedis yang bekerja di puskesmas maka akan meningkatkan PDRB per kapita sebesar 1.520,43 rupiah.

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dari model diperoleh koefisien TPAK sebesar 150.96 dengan probabilitas 0,0000 yang dibawah $\alpha=5\%$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen TPAK maka akan meningkatkan PDRB per kapita sebesar 150.96 rupiah.

d. Alokasi Investasi

Dari model diperoleh koefisien INVESTASI sebesar 0,275108 dengan probabilitas 0,0016 yang dibawah $\alpha=5\%$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan investasi sebesar 1 milyar rupiah maka akan meningkatkan PDRB per kapita sebesar 281,61 rupiah.

Dengan melihat besaran koefisien regresi hasil estimasi tersebut dapat digunakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan prioritas kebijakan dalam mengurangi tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Barat. Prioritas kebijakan tersebut adalah:

1. Penyediaan tenaga pengajar di tingkat sekolah dasar dengan memperhatikan jumlah dan penyebarannya di masing-masing kabupaten/kota.
2. Penyediaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya baik dengan menciptakan lapangan kerja baru maupun perluasan dari lapangan kerja yang sudah ada.
3. Penyediaan tenaga medis yang bekerja di puskesmas baik itu puskesmas utama, puskesmas pembantu maupun puskesmas keliling.
4. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dengan cara memberikan insentif bagi para pengusaha agar tertarik menanamkan investasinya di daerah tersebut. Bentuk insentif tersebut dapat berupa kemudahan dalam mendirikan usaha baru.

Dari hasil regresi didapatkan pula karakteristik disparitas pendapatan antar kabupaten/kota yang tercermin pada nilai intercept masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Nilai Intercept Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Kab/Kota	Kuadran	Intercept
Kab. Karawang	1	-852303.7
Kab. Bekasi	1	10788170
Kota Bandung	1	-510044.2
Kab. Indramayu	2	-713866.2
Kab. Purwakarta	2	-1614818.
Kota Cirebon	2	9038107.
Kota Cimahi	2	1572983.
Kab. Bogor	3	-2617810.
Kab. Sukabumi	3	-4867552.
Kab. Cianjur	3	-5055116.
Kab. Bandung	3	-3673140.
Kab. Garut	3	-4353335.
Kab. Tasikmalaya	3	-5882215.
Kab. Ciamis	3	-5809223.
Kab. Kuningan	3	-6337221.
Kab. Cirebon	3	-5286540.
Kab. Majalengka	3	-6223230.
Kab. Sumedang	3	-4404557.
Kab. Subang	3	-4148940.
Kota Tasikmalaya	3	-5731288.
Kota Banjar	3	-4807712.
Kota Bogor	4	-3724335.
Kota Sukabumi	4	-2208166.
Kota Bekasi	4	-2438302.
Kota Depok	4	-5063391.

Sumber: Data diolah

Dari tabel 4.8. terlihat adanya variasi dari intercept masing-masing kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa memang terdapat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota se Provinsi Jawa Barat dengan nilai intercept tertinggi adalah Kabupaten Bekasi (kuadran 1) sebesar 10.788.170 yang artinya jika nilai rasio guru terhadap murid nol, jumlah dokter nol, TPAK nol persen dan alokasi investasi nol rupiah maka nilai PDRB per kapita sebesar Rp. 10.788.170,- dan nilai intercept terendah adalah Kabupaten Kuningan (kuadran 3) sebesar -6.337.221 yang artinya jika nilai rasio guru terhadap murid nol, jumlah dokter nol, TPAK nol persen dan alokasi investasi nol rupiah maka nilai PDRB per kapita sebesar - Rp. 6.337.221,-. Tanda positif berarti daerah tersebut mempunyai nilai

PDRB per kapita yang tidak begitu terpengaruh oleh faktor-faktor yang masuk dalam model (rasio guru terhadap murid, jumlah dokter, TPAK dan alokasi investasi) sedangkan tanda negatif berarti daerah tersebut mempunyai nilai PDRB per kapita yang tergantung kepada faktor-faktor tersebut.

Daerah-daerah di kuadran 1 didominasi oleh intercept yang negatif kecuali Kabupaten Bekasi. Namun nilai intercept yang negatif tersebut tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di kuadran lain. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di kuadran ini sedikit terpengaruh oleh faktor-faktor yang masuk dalam model. Nilai intercept di kuadran 2 berimbang, nilai intercept yang negatif berada di daerah yang bercorak kabupaten yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Purwakarta sedangkan nilai intercept yang positif berada di daerah yang bercorak perkotaan yaitu Kota Cirebon dan Kota Cimahi.

Daerah-daerah di kuadran 3 didominasi oleh intercept yang negatif. Semua daerah di kuadran ini mempunyai intercept yang negatif dan bernilai negatif yang sangat tinggi dibandingkan dengan nilai intercept negatif di kuadran lainnya. Hal ini menunjukkan betapa daerah-daerah di kuadran ini sangat tergantung kepada faktor-faktor yang masuk dalam model seperti rasio guru terhadap murid, jumlah dokter, TPAK dan alokasi investasi. Sedangkan daerah-daerah di kuadran 4 walaupun didominasi oleh intercept yang negatif namun nilai tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai intercept kabupaten/kota yang berada di kuadran 3.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecenderungan daerah-daerah yang berada di kuadran 1 sedikit terpengaruh oleh faktor-faktor yang masuk di dalam model seperti rasio guru terhadap murid, jumlah dokter, TPAK dan alokasi investasi sedangkan daerah yang cenderung tergantung kepada faktor-faktor tersebut adalah kabupaten/kota yang berada di kuadran 3.

4.3.2 Hubungan Aspek Pendidikan terhadap Disparitas Pendapatan dan Perkembangannya di Provinsi Jawa Barat

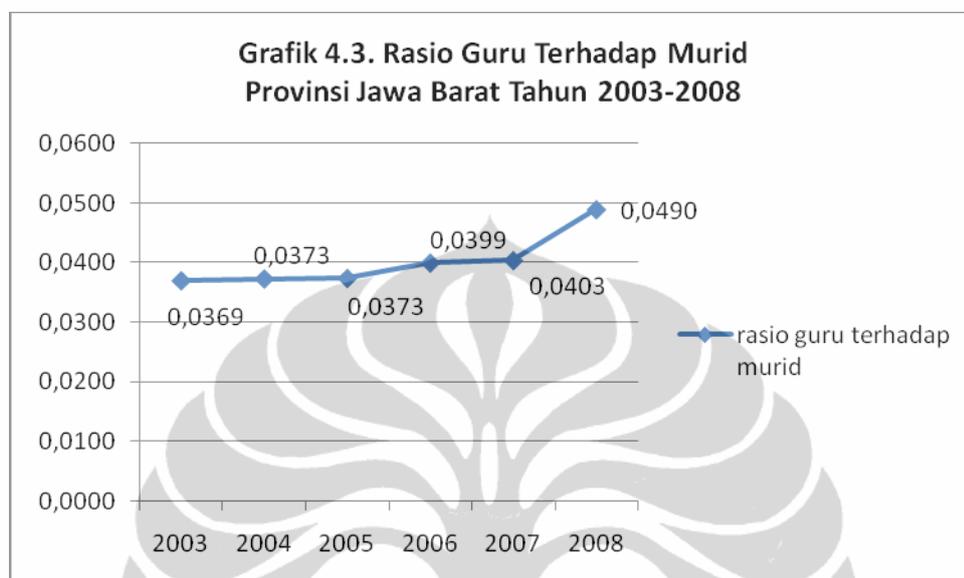
Hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel rasio guru dan murid dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: banyak pendapat yang menyatakan bahwa dalam era globalisasi hanya negara dengan SDM yang berkualitas yang akan mampu bersaing dengan negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hendaknya perlu lebih memperhatikan upaya pembangunan SDM yang berkualitas melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan pelayanan pendidikan dasar baik formal maupun non formal.

Todaro (2006) menyatakan bahwa investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan mampu meningkatkan pendapatan yang dinamakan dengan pendekatan modal manusia. Todaro menganalogikan investasi konvensional dalam modal fisik telah dibuat setelah investasi awal dilakukan, maka dapat dihasilkan suatu aliran penghasilan masa depan dari perbaikan pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, suatu tingkat pengembalian (*rate of return*) dapat diperoleh dibandingkan dengan pengembalian dari investasi yang lain.

Penyiapan tenaga kependidikan merupakan salah satu program pembangunan SDM di Provinsi Jawa Barat. Namun penyiapan tenaga kependidikan tersebut hendaknya bukan hanya mementingkan kuantitasnya saja akan tetapi penyebarannya di seluruh wilayah provinsi mesti diperhatikan.

Dari hasil penelitian, rasio guru terhadap murid di tingkatan sekolah dasar mempengaruhi tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dimungkinkan rasio guru terhadap murid di daerah pinggiran lebih kecil dibandingkan di pusat provinsi ataupun daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota negara. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memperhatikan nasib tenaga pengajar di daerah-daerah perbatasan dan terpencil sehingga tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan akan tercapai. Sedangkan jumlah sarana pendidikan berdasarkan

penelitian ini tidak berpengaruh terhadap tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota. Hal ini dimungkinkan karena penambahan sarana pendidikan berupa bangunan sekolah relatif lebih lambat dibandingkan dengan penambahan tenaga pengajar.



Sumber : data diolah

Perkembangan rasio guru terhadap murid di Jawa Barat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (lihat grafik 4.3) namun distribusinya tidak merata ke seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat apabila membandingkan beberapa kabupaten/kota yang berada pada masing-masing kuadran pada Tipologi Klaasen. Di kuadran 1 yang merupakan kabupaten/kota sejahtera yang diwakili oleh Kota Bandung rata-rata rasio guru terhadap murid selama periode penelitian adalah sebesar 0,0424 atau sekitar satu guru untuk 24 murid. Namun jika melihat Kabupaten Sukabumi yang termasuk dalam kuadran 3 (kabupaten/kota relatif tertinggal) hanya mempunyai rata-rata guru terhadap murid sebesar 0,0294 atau sekitar satu guru untuk 34 orang. Begitu juga dengan kondisi Kabupaten Bogor yang masih berada dalam kuadran 3 memiliki rata-rata rasio guru terhadap murid paling kecil yaitu sebesar 0,0257 atau satu guru untuk 40 murid.

Untuk kabupaten/kota yang termasuk dalam kuadran 2 dan 4 pada umumnya memiliki rata-rata rasio guru terhadap murid sekitar 0,0334 sampai 0,0408 dimana rata-rata rasio guru terhadap murid yang paling

rendah berada pada kuadran 4 yaitu Kota Bekasi dengan rata-rata rasio guru terhadap murid sebesar 0,0334 atau satu guru untuk 30 murid sedangkan rata-rata rasio guru terhadap murid tertinggi berada pada dua daerah dengan rata-rata rasio guru terhadap murid yang sama yaitu sebesar 0,0408 atau satu guru untuk 25 murid yaitu Kota Cimahi yang berada pada kuadran 2 dan Kota Sukabumi yang berada pada kuadran 4.

Tabel 4.9.
Rasio Guru Terhadap Murid Kab/Kota se Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2008

No.	Kab/Kota	Kuadran	Rasio Guru Terhadap Murid						Rata-rata
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1	Kab. Karawang	1	0,0280	0,0303	0,0305	0,0286	0,0309	0,0411	0,0316
2	Kab. Bekasi	1	0,0309	0,0206	0,0245	0,0282	0,0298	0,0318	0,0276
3	Kota. Bandung	1	0,0348	0,0433	0,0434	0,0433	0,0409	0,0484	0,0424
4	Kab. Indramayu	2	0,0304	0,0330	0,0330	0,0376	0,0340	0,0422	0,0350
5	Kab. Purwakarta	2	0,0354	0,0362	0,0347	0,0389	0,0380	0,0490	0,0387
6	Kota. Cirebon	2	0,0349	0,0345	0,0346	0,0416	0,0386	0,0505	0,0391
7	Kota. Cimahi	2	0,0349	0,0393	0,0393	0,0402	0,0434	0,0478	0,0408
8	Kab. Bogor	3	0,0243	0,0236	0,0245	0,0236	0,0275	0,0308	0,0257
9	Kab. Sukabumi	3	0,0272	0,0234	0,0290	0,0290	0,0288	0,0388	0,0294
10	Kab. Cianjur	3	0,0280	0,0290	0,0289	0,0386	0,0368	0,0411	0,0337
11	Kab. Bandung	3	0,0314	0,0286	0,0286	0,0347	0,0325	0,0484	0,0340
12	Kab. Garut	3	0,0326	0,0320	0,0356	0,0347	0,0348	0,0432	0,0355
13	Kab. Tasikmalaya	3	0,0439	0,0459	0,0452	0,0411	0,0398	0,0564	0,0454
14	Kab. Ciamis	3	0,0609	0,0558	0,0568	0,0568	0,0606	0,0732	0,0607
15	Kab. Kuningan	3	0,0483	0,0487	0,0504	0,0600	0,0586	0,0658	0,0553
16	Kab. Cirebon	3	0,0285	0,0403	0,0258	0,0309	0,0296	0,0383	0,0322
17	Kab. Majalengka	3	0,0469	0,0475	0,0339	0,0462	0,0484	0,0621	0,0475
18	Kab. Sumedang	3	0,0496	0,0537	0,0536	0,0572	0,0626	0,0701	0,0578
19	Kab. Subang	3	0,0374	0,0376	0,0450	0,0453	0,0489	0,0546	0,0448
20	Kota. Tasikmalaya	3	0,0428	0,0439	0,0457	0,0475	0,0474	0,0535	0,0468
21	Kota. Banjar	3	0,0446	0,0409	0,0451	0,0471	0,0500	0,0576	0,0476
22	Kota. Bogor	4	0,0395	0,0355	0,0357	0,0380	0,0345	0,0465	0,0383
23	Kota. Sukabumi	4	0,0348	0,0376	0,0396	0,0446	0,0432	0,0451	0,0408
24	Kota. Bekasi	4	0,0327	0,0285	0,0294	0,0333	0,0331	0,0436	0,0334
25	Kota. Depok	4	0,0282	0,0346	0,0342	0,0348	0,0339	0,0367	0,0337

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka beberapa tahun diolah

Rasio guru terhadap murid masing-masing kuadran bervariasi namun menunjukkan variasi yang hampir seragam, di kuadran 1 rasio guru terhadap murid berkisar antara 0,0276 sampai 0,0424; di kuadran 2

berkisar antara 0,0350 sampai dengan 0,0408; di kuadran 3 yang merupakan daerah yang tertinggal terdapat jarak yang cukup jauh dari yang terkecil sebesar 0,0257 (Kab. Bogor) sampai yang terbesar di Kab. Sumedang rasio guru terhadap murid sebesar 0,0578; sedangkan di kuadran 4 mempunyai rentang yang cukup dekat dari yang terkecil sebesar 0,0334 (Kota Bekasi) sampai dengan yang terbesar sebesar 0,0408 (Kota Sukabumi).

4.3.3 Hubungan Aspek Tenaga Kerja terhadap Disparitas Pendapatan dan Perkembangannya di Provinsi Jawa Barat

Hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel tingkat partisipasi angkatan kerja dengan variabel PDRB per kapita. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih. Mereka terdiri dari 'angkatan kerja' dan 'bukan angkatan kerja'. Proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan proporsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja yakni yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Untuk menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja maka digunakan ukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Berdasarkan penelitian, TPAK berpengaruh terhadap tingkat kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja berarti mendorong peningkatan output regional, dengan asumsi peningkatan tenaga kerja diikuti dengan peningkatan produktivitas. Secara teori daya tarik dari tenaga kerja adalah upah atau kompensasi yang mereka dapatkan. Jika upah mereka besar maka ada kecenderungan produktivitas mereka akan naik dalam proses produksi, yang berarti dengan meningkatnya proses produksi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu faktor lainnya yang tidak kalah penting dalam proses produksi adalah ketersediaan kesempatan kerja di masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan terbukanya kesempatan kerja yang ada akan

mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga jika masyarakat sebagai penyedia tenaga kerja mampu terserap dengan baik maka masalah pengangguran dapat teratasi. Namun sebaliknya jika penambahan tenaga kerja tidak diimbangi oleh penambahan kesempatan kerja yang diciptakan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru maupun ekspansi perusahaan dengan memperluas perusahaan, maka akan menambah jumlah pengangguran sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi regional.

Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat cukup bervariasi. Nilai TPAK tertinggi dicapai oleh Kabupaten Ciamis sebesar 59,78% sedangkan nilai TPAK terendah dicapai oleh Kota Sukabumi sebesar 45,92%. Selisih yang cukup jauh dari nilai TPAK ini diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan oleh hasil regresi yang telah dilakukan.

Daerah-daerah di kuadran 1 mempunyai nilai TPAK yang cukup baik mulai dari yang terkecil sebesar 48,94% di Kab. Karawang dan tertinggi sebesar 54,05% di Kota Bandung. Begitu juga dengan daerah-daerah di kuadran 2 dan kuadran 3 mempunyai rata-rata TPAK yang lebih baik dari pada daerah-daerah di kuadran 1, dimana semua daerah tersebut mempunyai rata-rata TPAK lebih dari 50% bahkan rata-rata TPAK di Kabupaten Ciamis mencapai nilai tertinggi sebesar 59,78%. Sedangkan rata-rata TPAK di kuadran 4 mempunyai nilai lebih rendah dibandingkan dengan kuadran lainnya dimana terdapat tiga daerah yang mempunyai rata-rata TPAK kurang dari 50% yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Bekasi dan hanya satu daerah yang mempunyai rata-rata TPAK lebih dari 50% yaitu Kota Depok. Namun secara keseluruhan nilai rata-rata TPAK masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan nilai yang cukup baik dimana sebagian besar kabupaten/kota tersebut mempunyai nilai rata-rata TPAK yang lebih besar dari lima puluh persen.

Tabel 4.10.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab/Kota se Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2008

No.	Kab/Kota	Kuadran	TPAK (%)						Rata-rata
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1	Kab. Karawang	1	46,97	47,67	48,62	49,75	49,92	50,71	48,94
2	Kab. Bekasi	1	49,67	50,48	50,06	50,92	51,42	51,93	50,75
3	Kota. Bandung	1	52,43	53,55	53,7	54,18	54,78	55,68	54,05
4	Kab. Indramayu	2	60,27	58,3	53,6	54,18	55,74	55,93	56,34
5	Kab. Purwakarta	2	50,44	51,08	50,53	51,06	52,78	52,31	51,37
6	Kota. Cirebon	2	50,60	51,58	51,58	52,14	52,89	53,78	52,10
7	Kota. Cimahi	2	50,33	51,5	52,01	52,28	53,73	54,17	52,34
8	Kab. Bogor	3	50,15	50,07	50,66	50,71	50,87	51,06	50,59
9	Kab. Sukabumi	3	50,24	50,49	50,58	51,61	53,02	53,21	51,53
10	Kab. Cianjur	3	51,35	52,17	52,66	52,18	53,23	53,51	52,52
11	Kab. Bandung	3	52,97	53,68	54,43	55,97	55,62	56,38	54,84
12	Kab. Garut	3	52,29	52,08	52,58	53,06	53,28	53,38	52,78
13	Kab. Tasikmalaya	3	55,99	56,56	55,12	58,44	58,99	59,51	57,44
14	Kab. Ciamis	3	58,38	58,63	59,6	60,08	60,34	61,66	59,78
15	Kab. Kuningan	3	56,77	55,05	57,58	60,07	59,79	60,84	58,35
16	Kab. Cirebon	3	49,88	50,27	50,62	51,79	52,67	53,01	51,37
17	Kab. Majalengka	3	52,02	54,94	56,15	59,18	60,26	61,89	57,41
18	Kab. Sumedang	3	50,12	51,41	51,44	55,17	55,1	56,48	53,29
19	Kab. Subang	3	50,73	52,67	52,41	51,94	50,97	51,74	51,74
20	Kota. Tasikmalaya	3	53,87	54,21	54,73	56,72	57,83	58,88	56,04
21	Kota. Banjar	3	49,36	50,47	49,73	50,14	51,46	52,68	50,64
22	Kota. Bogor	4	46,36	46,3	47,12	48,47	48,99	50,04	47,88
23	Kota. Sukabumi	4	42,88	46,91	46,75	46,61	45,99	46,37	45,92
24	Kota. Bekasi	4	48,34	49,92	49,65	48,49	48,99	50,55	49,32
25	Kota. Depok	4	48,63	50,1	51,96	51,56	51,88	53,74	51,31

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka beberapa tahun diolah

4.3.4 Hubungan Aspek Kesehatan terhadap Disparitas Pendapatan dan Perkembangannya di Provinsi Jawa Barat

Hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel jumlah dokter/paramedis dengan variabel PDRB per kapita. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: ketersediaan prasarana dan sarana dalam hal ini jumlah dokter/paramedis yang bekerja di puskesmas-puskesmas diyakini oleh banyak kalangan sebagai faktor yang

dapat mengakselerasikan perkembangan perekonomian suatu wilayah, sebab melalui prasarana dan sarana berbagai kemudahan dapat diperoleh, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Untuk itu peran pemerintah yang efektif dalam sistem kesehatan termasuk di dalamnya penyediaan tenaga kesehatan/dokter/paramedis merupakan hal yang kritis untuk ditindak lanjuti. Hal ini dikarenakan tiga alasan penting. Pertama, kesehatan merupakan hal yang sentral dalam mengentaskan kemiskinan, karena masyarakat sering kali kurang mendapat informasi mengenai kesehatan akibat kemiskinan. Kedua, rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk kesehatan karena mereka mungkin mengabaikan eksternalitas (seperti penularan penyakit). Ketiga, pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan dan penelitian serta pengembangan dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang, karena kegagalan pasar. Pemerintah mempunyai peran yang berbeda di negara yang berbeda, namun seperti yang disimpulkan oleh WHO. “manajemen yang cermat dan bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat-kepengurusan-merupakan inti dari pemerintah yang baik. Kesehatan masyarakat selalu merupakan prioritas nasional: tanggung jawab pemerintah atas hal ini akan terus berkelanjutan dan bersifat permanen”. (Todaro, 2006).

Berdasarkan hasil regresi, faktor jumlah dokter yang bekerja di puskesmas mempengaruhi disparitas pendapatan di Kota Tasikmalaya dengan tingkat signifikansi yang cukup tinggi yaitu 0,0000. Ini berarti pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu memperhatikan jumlah dokter per penduduk dan sebarannya agar derajat kesehatan dapat tercapai.

Perkembangan jumlah dokter di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel 4.11. dimana apabila dibandingkan tingkat penyebarannya pada kuadran 1 yang merupakan daerah yang sejahtera mempunyai rata-rata jumlah dokter tiap kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan dengan kuadran 3. Dimana rata-rata jumlah dokter di Kabupaten Karawang sebesar 80,50; Kabupaten Bekasi 92,67 bahkan di Kota Bandung mencapai angka

149,33 sedangkan di kuadran 3 masih terdapat rata-rata jumlah dokter yang berada di bawah 60 seperti Kabupaten Tasikmalaya (53,17), Kabupaten Kuningan (51,00), Kabupaten Majalengka (55,67), Kabupaten Sumedang (48,83), Kota Tasikmalaya (36,17) bahkan Kota Banjar mempunyai rata-rata jumlah dokter terendah yaitu hanya 8,17. Namun di kuadran 3 ini juga terdapat rata-rata jumlah dokter yang lebih besar dari kebanyakan daerah di kuadran 3 lainnya yaitu Kabupaten Bogor (252,50) dan Kabupaten Bandung (149,17). Hal ini dimungkinkan karena luas wilayah dari dua kabupaten tersebut lebih luas dibandingkan dengan daerah lainnya yang berada di kuadran tersebut.

Untuk daerah kuadran 2 rata-rata jumlah dokter masing-masing kabupaten/kota berkisar antara 65 sampai 75 kecuali Kota Cimahi yang mempunyai rata-rata jumlah dokter sebesar 37,67 hal ini dapat dimaklumi karena Kota Cimahi merupakan kota yang baru terbentuk di tahun 2001 sehingga penyediaan tenaga kesehatan/dokter di daerah ini cenderung masih sangat sedikit. Sedangkan daerah yang berada pada kuadran 4 rata-rata jumlah dokter masing-masing kabupaten/kota sekitar 90 sampai 110 kecuali Kota Sukabumi yang hanya mempunyai rata-rata jumlah dokter sebesar 41,17. (untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.11.).

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata jumlah dokter paling tinggi berada di daerah-daerah yang terdapat di kuadran 1 selanjutnya diikuti oleh kuadran 4, kuadran 2 dan yang paling kecil berada di kuadran 3 yang merupakan daerah tertinggal.

Tabel 4.11.
Jumlah Dokter/Paramedis Kab/Kota se Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2008

No.	Kab/Kota	Kuadran	Jumlah Dokter (orang)						Rata-rata
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1	Kab. Karawang	1	110	81	63	73	79	77	80,50
2	Kab. Bekasi	1	55	96	85	103	113	104	92,67
3	Kota. Bandung	1	142	144	162	162	147	139	149,33
4	Kab. Indramayu	2	80	51	58	50	60	77	62,67
5	Kab. Purwakarta	2	57	55	62	77	76	71	66,33
6	Kota. Cirebon	2	74	66	80	80	72	83	75,83
7	Kota. Cimahi	2	36	22	45	41	38	44	37,67
8	Kab. Bogor	3	183	244	254	255	288	291	252,50
9	Kab. Sukabumi	3	92	98	92	94	66	77	86,50
10	Kab. Cianjur	3	61	81	99	58	64	74	72,83
11	Kab. Bandung	3	195	187	177	121	107	108	149,17
12	Kab. Garut	3	113	90	92	95	93	89	95,33
13	Kab. Tasikmalaya	3	52	51	56	52	57	51	53,17
14	Kab. Ciamis	3	108	88	91	62	61	62	78,67
15	Kab. Kuningan	3	46	44	49	54	54	59	51,00
16	Kab. Cirebon	3	32	82	93	112	112	116	91,17
17	Kab. Majalengka	3	64	50	67	44	53	56	55,67
18	Kab. Sumedang	3	63	33	41	43	48	65	48,83
19	Kab. Subang	3	68	64	67	70	75	67	68,50
20	Kota. Tasikmalaya	3	36	35	35	35	42	34	36,17
21	Kota. Banjar	3	8	8	8	8	8	9	8,17
22	Kota. Bogor	4	74	174	109	107	107	108	113,17
23	Kota. Sukabumi	4	29	40	48	43	45	42	41,17
24	Kota. Bekasi	4	66	118	144	144	151	137	126,67
25	Kota. Depok	4	80	89	90	95	89	106	91,50

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka beberapa tahun diolah

4.3.5 Hubungan Aspek Alokasi Investasi terhadap Disparitas Pendapatan dan Perkembangannya di Provinsi Jawa Barat

Hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel alokasi investasi dengan variabel PDRB per kapita. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: disparitas pendapatan antar daerah dapat disebabkan oleh terpusatnya investasi pada suatu daerah tertentu, hal ini sejalan dengan pendapat Todaro yang menyatakan bahwa ada korelasi

positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara maju ditunjang dengan adanya investasi yang tinggi, sebaliknya negara terbelakang dengan investasi yang rendah menyebabkan rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Berdasarkan penelitian ini, ternyata memang benar alokasi investasi dapat mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan. Meningkatnya investasi pada suatu daerah atau kabupaten/kota tertentu akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi kabupaten/kota tersebut sedangkan di daerah lain yang besaran investasinya biasa-biasa saja maka akan tertinggal dari kabupaten/kota yang investasinya sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.12. dimana kabupaten/kota yang berada pada kuadran 1 pada umumnya mempunyai besaran investasi yang mencapai angka triliunan seperti Kota Bandung mempunyai rata-rata investasi sebesar 4,80 triliun, Kabupaten Bekasi 3,34 triliun dan Kabupaten Karawang 1,38. Sedangkan kabupaten/kota yang berada pada kuadran 3 pada umumnya mempunyai besaran investasi di bawah 200 milyar kecuali Kabupaten Bogor (1,36 T), Kabupaten Bandung (2,49 T) dan Kabupaten Cirebon (675 milyar). Besarnya rata-rata investasi di kuadran 1 bisa dimengerti karena daerah-daerah di kuadran tersebut mempunyai potensi ekonomi di sektor industri pengolahan atau peranan sektor industri pengolahan yang cukup dominan di daerahnya, antara lain; Kabupaten Bekasi (78,63%) dan Kabupaten Karawang (54,00%). Sedangkan selain sektor industri yang cukup besar (35,73%) Kota Bandung mempunyai sektor lain yang lebih dominan yaitu sektor perdagangan (40,06%) sehingga besaran investasi di daerah-daerah tersebut lebih besar dibandingkan dengan kuadran-kuadran lainnya.

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran 2 mempunyai rata-rata investasi sedikit diatas 200 milyar kecuali Kota Cimahi yang hanya mempunyai rata-rata investasi sebesar 166 milyar kembali lagi hal ini dimungkinkan karena kota ini baru saja berdiri pada tahun 2001 sehingga besaran alokasi investasi di daerah ini masih sedikit. Sedangkan

kabupaten/kota yang berada pada kuadran 4 mempunyai rata-rata investasi sebesar 500 milyar kecuali Kota Sukabumi sebesar 67 milyar.

Pada kenyataannya, besaran dan alokasi investasi di tiap wilayah sangat dipengaruhi oleh dua pelaku utamanya, yaitu pengusaha dan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Bagi pemerintah investasi dilakukan dengan harapan investasi tersebut dapat memberikan efek multiplier bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus memilih sektor-sektor yang apabila berkembang mampu mendorong kemajuan sektor-sektor lain sehingga pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang didasarkan kepada karakteristik daerah itu sendiri. Di Provinsi Jawa Barat tujuan investasi bermacam-macam tergantung dari karakteristik daerah, untuk investasi di sektor pertanian Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka adalah daerah yang cocok untuk investasi tersebut, untuk sektor pertambangan Kabupaten Indramayu sedangkan kota Bandung dan Bekasi merupakan tujuan investor untuk berinvestasi pada sektor industri dan jasa. Selain itu dalam mengambil kebijakan investasi ini pemerintah harus mempertimbangkan besaran hasrat konsumsi masyarakat di tiap wilayah baik terhadap produk lokal maupun produk luar daerah, tingkat pajak di tiap wilayah maupun faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan besaran investasi yang berbeda untuk setiap wilayah.



Tabel 4.12.
Besaran Investasi Kab/Kota se Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2008

No.	Kab/Kota	Kuadran	Investasi (juta rupiah)						Rata-rata
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1	Kab. Karawang	1	556.745,00	656.845,00	943.419,00	1.532.665,00	2.182.429,00	2.452.488,00	1.387.431,83
2	Kab. Bekasi	1	2.794.676,00	2.933.409,00	2.879.560,00	3.233.649,00	3.321.082,00	4.927.266,00	3.348.273,67
3	Kota. Bandung	1	4.672.894,00	5.593.718,00	4.987.692,00	5.067.122,00	3.846.868,00	4.637.178,00	4.800.912,00
4	Kab. Indramayu	2	137.450,00	144.258,00	166.798,00	99.836,00	74.678,00	761.651,00	230.778,50
5	Kab. Purwakarta	2	1.794.268,00	3.185.492,00	2.620.252,00	2.288.610,00	394.544,00	1.051.890,00	1.889.176,00
6	Kota. Cirebon	2	168.273,00	177.497,00	187.810,00	163.329,00	183.682,00	319.610,00	200.033,50
7	Kota. Cimahi	2	108.474,00	147.433,00	98.343,00	149.394,00	241.436,00	255.805,00	166.814,17
8	Kab. Bogor	3	1.098.748,00	1.252.270,00	1.171.781,00	1.577.070,00	1.304.353,00	1.758.970,00	1.360.532,00
9	Kab. Sukabumi	3	126.785,00	151.431,00	134.270,00	175.438,00	214.025,00	349.806,00	191.959,17
10	Kab. Cianjur	3	157.458,00	125.155,00	202.865,00	189.686,00	165.019,00	225.928,00	177.685,17
11	Kab. Bandung	3	1.567.356,00	1.358.516,00	1.851.158,00	2.423.412,00	3.667.271,00	4.079.011,00	2.491.120,67
12	Kab. Garut	3	53.783,00	78.870,00	74.459,00	64.081,00	69.250,00	109.408,00	74.975,17
13	Kab. Tasikmalaya	3	47.346,00	38.377,00	57.951,00	82.006,00	61.727,00	88.881,00	62.714,67
14	Kab. Ciamis	3	136.596,00	122.161,00	108.417,00	129.769,00	147.390,00	154.669,00	133.167,00
15	Kab. Kuningan	3	48.686,00	55.454,00	62.697,00	42.714,00	55.396,00	52.034,00	52.830,17
16	Kab. Cirebon	3	637.843,00	771.798,00	762.702,00	638.782,00	643.150,00	601.474,00	675.958,17
17	Kab. Majalengka	3	33.796,00	26.904,00	71.828,00	85.221,00	103.709,00	103.338,00	70.799,33
18	Kab. Sumedang	3	89.367,00	97.446,00	111.163,00	160.564,00	132.180,00	151.883,00	123.767,17
19	Kab. Subang	3	384.241,00	405.658,00	377.355,00	369.343,00	478.906,00	256.174,00	378.612,83
20	Kota. Tasikmalaya	3	93.872,00	96.275,00	95.779,00	100.860,00	160.184,00	199.685,00	124.442,50

(Lanjutan Tabel 4.12.)

No.	Kab/Kota	Kuadran	Investasi (juta rupiah)						Rata-rata
			2003	2004	2005	2006	2007	2008	
21	Kota. Banjar	3	127.364,00	1.384,00	3.915,00	7.894,00	9.181,00	27.756,00	29.582,33
22	Kota. Bogor	4	275.885,00	214.821,00	505.645,00	454.188,00	529.885,00	1.086.227,00	511.108,50
23	Kota. Sukabumi	4	47.894,00	52.012,00	41.909,00	51.066,00	78.008,00	133.314,00	67.367,17
24	Kota. Bekasi	4	283.794,00	268.732,00	433.239,00	458.560,00	743.463,00	766.247,00	492.339,17
25	Kota. Depok	4	238.573,00	271.062,00	340.742,00	525.916,00	525.340,00	616.138,00	419.628,50

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka beberapa tahun diolah

